

**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH WARGA
TELUKJAMBE ATAS ADANYA SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN
YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA
TANGERANG**

Ashilah Deyu Zafira

Fakultas Hukum

Pembimbing :

Sriwati, S.H., M.Hum.

Suhariwanto, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah pedesaan masih banyak yang mengalami berbagai permasalahan perkonomian maupun permasalahan sosial. Masih banyak warga-warga kecil yang memiliki hak untuk menikmati kekayaan sumber daya alam, tetapi karena kurangnya kewenangan, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan. Struktur penguasaan yang timpang seringkali ditemukan di Indonesia. Terdapat konflik pemakaian tanah di Desa Wanajaya, kecamatan Telukjambe Barat, kabupaten karawang. Konflik kepemilikan tanah tersebut antara masyarakat adat yang menduduki dan mengelola tanah tersebut puluhan tahun dengan PT Pertiwi Lestari sebagai pemegang sertifikat Hak Guna Usaha (selanjutnya disebut HGU) dan sertifikat Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut HGB), sengketa lahan dipicu sejak tahun 2013 silam, saat PT Pertiwi Lestari sebuah perusahaan pengembang industri, tiba-tiba memagari lahan yang telah lebih dulu digarap warga dengan pagar beton di area seluas 791 hektar. Semula sebelum perusahaan masuk di lahan tersebut telah menjadi ladang garap, berikut ratusan rumah petani.

Kata Kunci : PT Pertiwi Lestari, Teluk Jambe Barat, Konflik Pemakaian Tanah.

***LEGAL ACTIONS THAT CAN BE PROVIDED BY THE CITY OF THE
TELUKJAMBE ON THE EXISTENCE OF CERTIFICATES OF BUILDING
RIGHTS TAKEN BY THE CITY OFFICES***

Ashilah Deyu Zafira

Fakultas Hukum

Pembimbing :

Sriwati, S.H., M.Hum.

Suhariwanto, S.H., M.Hum

ABSTRACT

Indonesian community residing in rural areas and many are experiencing various problems economics and social problems. There are still many small citizens who have the right to enjoy the wealth of natural resources, but because of lack of authority, wealth of natural resources owned by the Indonesian state is only enjoyed by a group of people who have the authority and power. Imbalanced governance structure often found in Indonesia. There is a conflict of land use in the village Wanajaya, sub Telukjambe Barat, Karawang district. Conflicts of land ownership among indigenous peoples who occupy and manage the land for decades with PT Pertiwi Lestari as the holder of the certificate of leasehold (hereinafter referred to HGU) and Hak Guna Bangunan (hereinafter HGB), land disputes triggered since 2013 ago, when PT Pertiwi Lestari an industrial development company, suddenly fence off land that had been first cultivated citizens with concrete fence in an area of 791 hectares. Initially, before the company entered in the land has gone into the fields to work on, following hundreds of farmhouses.

Keywords: PT Pertiwi Lestari, Teluk Jambe West, Land Use Conflicts.